

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti berusaha memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dominasi kaum miskin di perkotaan menciptakan sedemikian banyak kendala bagi pengadaan rumah di perkotaan. Kehadiran pemukiman kumuh pada dasarnya sebagai akibat perkembangan pemukiman, kondisi pemukiman di Bandung menarik untuk dikaji, karena Bandung memiliki lingkungan permukiman kumuh. Salah satunya di kecamatan Bojongloa Kidul. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat kekumuhan yang menggunakan standarisasi dari Dirjen Perumahan dan Pemukiman bahwa di Kebon Lega memiliki indeks tingkat kekumuhan sebesar 2,90 termasuk kedalam kategori kumuh sedang, di Cibaduyut memiliki indeks tingkat kekumuhan sebesar 2,66 termasuk kedalam kategori kumuh sedang, dan di Cibaduyut Kidul memiliki indeks tingkat kekumuhan sebesar 2,22 termasuk kedalam kategori kumuh ringan. Namun dilihat dari segi anatomi pemukiman, di ketiga kelurahan itu mempunyai kesamaan, yaitu pemukiman itu salah tempat, tidak memenuhi syarat yang

paling dasar bagi keamanan, kesehatan, dan kesempatan memajukan penghuninya

2. Persebaran pemukiman kumuh dengan melihat kondisi pemukiman kumuh yang ada di kecamatan Bojongloa Kidul akan berbeda pula karakteristik permasalahannya dengan di tempat lainnya. Ini dapat disebabkan oleh banyak hal yang cukup kompleks. Dari hasil kajian yang telah ada sebelumnya dari enam kelurahan yang di Kecamatan Bojongloa Kidul, mayoritas lokasi pemukiman kumuh terakumulasi di kelurahan Cibaduyut ini disebabkan lokasi ini merupakan pusat perekonomian terutama pertokoan sepatu.
3. Karakteristik sosial budaya pemukiman kumuh di kecamatan Bojongloa Kidul kota Bandung. Dilihat dari mata pencaharian penduduk yang bermukim di daerah pemukiman kumuh mayoritas berkerja pada sektor informal yaitu sebagai buruh kasar. Karakteristik dalam kepemilikan teknologi penduduk yang berada di daerah pemukiman kumuh mayoritas penduduk tidak memiliki alat komunikasi dan alat informasi yang memadai. Komunitas penghuni lingkungan permukiman kumuh sebagian besar pekerjaan mereka adalah tergolong sebagai pekerjaan sektor informal yang tidak memerlukan keahlian tertentu, misalnya sebagai buruh kasar atau kuli bangunan, sehingga pada umumnya tingkat penghasilan mereka sangat terbatas dan tidak mampu menyisihkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman sehingga mendorong terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang pada gilirannya munculnya permukiman kumuh.

B. Rekomendasi

Banyak hal-hal yang mempengaruhi timbul dan prosesnya kawasan menjadi suatu permukiman kumuh dengan berbagai macam karakteristik persoalan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan pemukiman kumuh sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul agar menata kembali masyarakat yang menempati tanah negara atau tanah yang tidak diperuntukkan untuk permukiman. Kemudian menyiapkan lahan permukiman baru yang layak huni sesuai dengan rencana tata ruang kota, menata kembali aktivitas jamban dan buang sampah di sungai dengan pemberian bantuan sarana kamar mandi atau WC yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.
2. Bagi pemerintah Kecamatan Bojongloa Kidul dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin. Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memang ingin meningkatkan pekerjaan sampingan. Dengan meningkatnya ekonomi maka dengan sendirinya mereka mampu meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggalnya
3. Dari hasil wawancara dengan pihak kecamatan, program pemerintah tentang bantuan hibah dari Walikota belum optimal, tanpa bantuan dari swadaya masyarakat sekitar permukiman tersebut. Ini berarti pendayagunaan peran masyarakat sebagai salah satu pemeran utama dalam mendukung keberhasilan

pembangunan perumahan dan permukiman. Peneliti menyarankan agar program bantuan tidak saja dari pemerintah tapi semua pihak, sehingga terwujud lingkungan yang baik.

